

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kunci keberhasilan pembangunan adalah pembangunan pendidikan. Kemajuan bidang pendidikan diharapkan dapat menciptakan kualitas sumber daya manusia yang maju dan mandiri. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha memajukan pendidikan telah di realisasikan secara konsisten dan konsekuen sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Bab III pasal 31 yang menyatakan bahwa :

1. tiap-tiap warga berhak mendapatkan pengajaran
2. pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh Undang-undang.

Untuk melaksanakan Undang-undang dasar 1945, berdasarkan ketentuan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Nomor IV/MPR/1999 maka ditetapkan dasar pembangunan pendidikan dan pengembangan generasi muda dengan memantapkan pendidikan nasional yang meliputi ; (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti, (2) Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai

pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Pada masa pembangunan jangka panjang pertama (PJP I), pendidikan lebih banyak difokuskan pada program perluasan dan pemerataan pendidikan. Sejak masa PJP II, pendidikan lebih diarahkan pada program peningkatan mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

Salah satu prioritas pembangunan nasional untuk meningkatkan sumber daya manusia yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Lampung Tahun 2003 tentang Sumber Daya Manusia adalah pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Kependidikan dasar, Menengah dan kejuruan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Lampung dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945 dan menyukseskan tujuan pembangunan di Provinsi Lampung, adalah melalui kebijakan pembangunan pada sektor pendidikan dengan sasarannya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas (intelektual, keahlian/keterampilan), berbudaya, beriman, dan bertakwa, baik melalui pendidikan sekolah maupun luar sekolah/BLK, dengan terus memperluas pemerataan kesempatan pendidikan, khususnya bagi penduduk kurang mampu di daerah terpencil.

Kebijakan pembangunan sektor pendidikan tersebut tertuang dalam visi dan misi pendidikan Provinsi Lampung yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu dan kesejahteraan tenaga pendidikan, memberdayakan lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan; melakukan pembaruan dan pemantapan system pendidikan termasuk pembaruan kurikulum dan pelaksanaan desentralisasi pendidikan, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dalam menghadapi perkembangan sumber daya manusia sedini mungkin.

Peningkatan sumber daya manusia melalui pembangunan sektor pendidikan dilakukan dengan berusaha meningkatkan pengeluaran pemerintah karena dengan pengeluaran sektor pendidikan yang semakin meningkat diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Lampung .

Tabel 1 : Anggaran Pembangunan Sektor Pendidikan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005-2008.

Tahun	Anggaran Pembangunan Sektor Pendidikan (Rp)	Perkembangan (%)
2005	38.378.674.286	-
2006	45.359.208.065	18.19
2007	88.765.611.962	95.69
2008	62.267.990.350	-29.85

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

Pada Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa anggaran pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 mengalami

peningkatan terus menerus setiap tahunnya, walaupun pada akhirnya tahun 2008 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pembangunan sektor pendidikan.

Kebijakan pembangunan sektor pendidikan tertuang dalam program-program pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung, yaitu :

1. Perluasan dan peningkatan mutu pendidikan TK, SD, dan SLTP.
2. Perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan SMU dan sekolah Kejuruan.
3. Pembinaan tenaga pendidikan.
4. Pengembangan PPKN dan Budi Pekerti, serta pembinaan beasiswa dan pembinaan OSIS Lampung.
5. Pengembangan minat baca.
6. Peningkatan Balai Penataran Guru (BPG)
7. Proyek Operasi perawatan Fasilitas (OPF) Dikdasmen Kodya Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Selatan, Lampung Barat, Lampung Timur, Tanggamus, Tulang Bawang, Pringsewu, Way Kanan, Kodya Metro, dan Pesawaran.

Salah satu program pembangunan pada sektor pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung adalah perluasan dan peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, SMU diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta

mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Dalam hal ini SMU yang dimaksud adalah SMU Negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah dan memperoleh dana pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk melihat keberhasilan program pembangunan tersebut dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu pendidikan SMU Negeri, dibuatlah tolak ukur terhadap pelaksanaan pembangunan pendidikan SMU Negeri, yang meliputi:

1. Pengadministrasian proyek dan penyusunan rencana teknis.
2. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, melalui pengadaan meja belajar, alat pendidikan, buku perpustakaan, dan alat pengolah data.
3. Pengadaan pendidikan pelatihan fungsional guru dan diklat fungsional guru.
4. Pembangunan, perawatan, operasi dan pemeliharaan gedung.
5. Pembangunan kelembagaan.
6. Pemantauan, pengendalian, pengawasan supervise konstruksi dan evaluasi.

Peningkatan sistem pendidikan SMU Negeri baik kualitas maupun kuantitas memerlukan biaya yang besar. Agar tercapai tujuan pembangunan pendidikan tersebut, maka perlu adanya suatu pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menunjang program atau proyek pendidikan SMU

Negeri baik tingkat nasional maupun daerah. Pembiayaan pendidikan dalam rangka perluasan dan peningkatan pendidikan SMU Negeri di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 2.

Tahun	Anggaran Pendidikan SMU Negeri (Rp)	Perkembangan Anggaran Pendidikan SMU Negeri (%)	Total Anggaran Pendidikan (Rp)	Perkembangan Total Anggaran Pendidikan (%)
2005	4.995.220.000	-	38.378.674.286	
2006	5.250.937.000	5.12	45.359.208.065	18.19
2007	8.715.000.000	65.97	88.765.611.962	95.69
2008	8.777.225.000	0.71	62.267.990.350	-29.85

**Tabel 2:
Anggaran
Pembangunan**

untuk Peningkatan Pendidikan SMU Negeri dan Total Anggaran Pendidikan di Provinsi Lampung

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

Pada Tabel 2 diatas terlihat bahwa total anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan jumlahnya berfluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 perkembangan total anggaran pendidikan sebesar 18,19 persen dengan anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan pendidikan SMU Negeri berkembang sebesar 5,12 persen. Tabel 2 diatas menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan SMU Negeri masih belum optimal. Hal ini terlihat dengan berfluktuatifnya total anggaran pendidikan yang cenderung menurun. Bila dilihat secara rinci, data untuk program kegiatan peningkatan pendidikan SMU Negeri secara sistematis dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Program pembangunan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan SMU Negeri di Provinsi Lampung tahun 2005-2008

Tahun	Kegiatan
2005	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi gedung sekolah 2. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan 3. Penyediaan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu 4. Penyediaan dana pengembangan SMUN / SMK 5. Pengadaan buku perustakaan
2006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi gedung sekolah 2. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 3. Persiapan penyelenggaraan akreditasi sekolah 4. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan (laboratorium, gedung olahraga) 5. Pengadaan buku ujian nasional SMUN / SMK
2007	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan alat praktik dan alat peraga siswa 2. Rehabilitasi sedang / berat ruang kelas sekolah 3. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 4. Penyelenggaraan akreditasi sekolah 5. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
2008	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan gedung sekolah 2. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa dan orientasi pengembangan wawasan dan kemandirian siswa 3. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 4. Penyediaan dana pengembangan SMUN / SMK 5. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 6. Pengadaan buku ujian nasional SMUN / SMK

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Lampung , 2009

Anggaran pendidikan dan program pembangunan pendidikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan SMU Negeri. Anggaran pembangunan pendidikan diharapkan dapat terus ditingkatkan oleh pemerintah mengingat semakin berkembangnya SMU-SMU Negeri di Provinsi Lampung.

Perkembangan SMU Negeri di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 : Perkembangan SMU Negeri di Provinsi Lampung Tahun 2005-2008.

Tahun	Jumlah SMUN	Perkembangan (%)	Jumlah Ruang Kelas	Perkembangan (%)	Jumlah Guru	Perkembangan (%)	Jumlah Murid	Perkembangan (%)
2005	112	-	1560	-	4058	-	56.498	-
2006	128	14.29	1602	2.69	4664	14.93	59.323	5.00
2007	132	3.13	1602	0.00	4834	3.64	59.445	0.21
2008	136	3.03	1608	0.37	5005	3.54	59.568	0.21

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Lampung Tahun 2008

Pada data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 jumlah SMU Negeri di Provinsi Lampung sebanyak 112 sekolah, 1560 ruang kelas, 4058 orang Guru/ tenaga pengajar, 56.498 siswa. Jumlah tersebut mengalami peningkatan terus menerus sampai dengan tahun 2008 dengan jumlah SMU Negeri 136 sekolah, 1608 ruang kelas, 5005 orang Guru/ tenaga pengajar dan 59.568 siswa.

Perkembangan peminat masuk SMU Negeri dari tahun ke tahun semakin menurun, ini dapat dilihat pada tahun 2006 perkembangannya 5.00 persen dan pada tahun 2008 turun menjadi 0.21 persen.

Alokasi anggaran pendidikan tersebut sangat mempengaruhi mutu pendidikan SMU Negeri di Provinsi Lampung. Perkembangan SMU-SMU Negeri tersebut dapat dilihat dengan melihat rasio murid terhadap guru, rasio murid terhadap sekolah, dan rasio murid terhadap kelas (Profil Pendidikan Provinsi Lampung, 2001 : 15)

Tabel 5 : Rasio Murid terhadap Guru, Murid terhadap sekolah, dan Murid terhadap kelas tahun 2005-2008.

Tahun	Rasio Murid/Guru	Rasio Murid/Sekolah	Rasio Murid/Kelas
2005	13.92	504.45	36.22
2006	12.72	463.46	37.03
2007	12.30	450.34	37.11
2008	11.90	438	37.04

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2008.

Pada tabel diatas terlihat bahwa rasio murid terhadap guru mengalami penurunan yaitu pada tahun 2005 sebesar 13.92 menjadi 11.90 pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa satu orang guru hanya mengajar 11 murid, yang artinya beban guru pada jenjang SMU Negeri jauh lebih ringan karena semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh akan semakin membutuhkan guru/ tenaga pengajar yang menguasai bidang atau ilmu pengetahuan yang diajarkan.

Rasio murid terhadap sekolah disamping menyatakan tingkat efisiensi penggunaan sekolah juga menggambarkan kecukupan sarana pendidikan dalam hal ini yang dimaksudkan adalah sekolah. Dari data diatas terlihat rasio murid terhadap sekolah mengalami penurunan dari 504.45 pada tahun 2005 menjadi 438 pada tahun 2008, yang berarti kebutuhan sekolah pada jenjang SMU Negeri menjadi menurun.

Menurut Depdiknas idealnya suatu kelas dihadiri kurang lebih oleh 40 murid dengan asumsi ukuran ruang kelas memenuhi ketentuan standar. Rasio murid terhadap kelas mengalami peningkatan pada kurun waktu tahun 2005 sebanyak 36.22 sampai tahun 2008 menjadi 37.04 murid per kelas. Dengan menggunakan

batasan jumlah murid per kelas 40 sebagai dasar pertimbangan, maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan sarana pendidikan/ sekolah efisiensi penyelenggaraannya telah efisien. Perkembangan SMU-SMU Negeri tersebut harus didukung pula dengan perkembangan pembangunan pendidikan demi terselenggaranya proses belajar mengajar yang efisien di sekolah agar mutu pendidikan tinggi yang diharapkan dapat tercapai.

Salah satu indikator mutu pendidikan adalah hasil belajar yang dikenal sebagai nilai Ujian Akhir Nasional (UAN). Nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Rata-rata Nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) SMU Negeri di Provinsi Lampung Tahun 2005-2008.

Tahun	Program Studi IPA	Program Studi IPS	Program Studi Bahasa	Rata-rata
2005	6,45	5,77	6,64	6,28
2006	7,74	6,88	7,48	7,37
2007	7,44	6,97	7,44	7,28
2008	7,44	6,97	6,96	7,12

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2008

Pada Tabel 6 terlihat bahwa rata-rata Nilai UAN SMU Negeri hanya terjadi satu kali peningkatan, yaitu pada tahun 2006 dimana nilai rata-rata UAN sebelumnya 6,28 pada tahun 2005 menjadi 7,37 pada tahun 2006. dan setelah itu rata-rata nilai UAN mengalami penurunan tiap tahunnya. Dimana tahun 2006 rata-rata nilai UAN 7,37 mengalami penurunan hingga tahun 2008 mencapai 7,12.

Pentingnya pembangunan di bidang pendidikan pada tingkat SMU Negeri di Provinsi Lampung harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Karena apabila pengeluaran pemerintah meningkat, maka diharapkan mutu pendidikan

SMU Negeri juga meningkat.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan data di atas dapat dilihat bahwa total anggaran sektor pendidikan dan anggaran pendidikan SMU Negeri nilainya cenderung mengalami penurunan seperti terlihat pada Tabel 2. Total anggaran pendidikan dengan rata-rata perkembangan 18,19 persen pada tahun 2006 terus mengalami penurunan hingga tahun 2008 hanya sebesar -29,85 persen. Rata-rata anggaran pendidikan SMU Negeri pada tahun 2006 sebesar 5,12 persen tetapi pada tahun 2008 menurun dengan rata-rata hanya sebesar 0,71 persen. Akibatnya mutu pendidikan menurun dan nilai rata-rata Ujian Akhir Nasional (UAN) juga menurun. Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik permasalahan bagaimana kebijakan pemerintah daerah provinsi lampung dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan SMU Negeri di Provinsi Lampung yang dilihat dari alokasi anggaran sektor pendidikan.

C. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan SMU Negeri di Provinsi Lampung dilihat dari sisi nilai UAN rata-rata melalui alokasi anggaran.

D. Kerangka Pemikiran

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa atau biaya yang

harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 2000 : 169). Pengeluaran pemerintah daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Secara garis besar, pengeluaran negara dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk membiayai kegiatan rutin pelaksanaan pemerintah.
 - b. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan (sektor-sektor)
- (Marselina 2006 : 39).

Pada masa pembangunan jangka panjang pertama (PJP I), pendidikan lebih banyak difokuskan pada program perluasan dan pemerataan pendidikan. Sejak masa PJP II, pendidikan lebih diarahkan pada program peningkatan mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

Salah satu prioritas pembangunan nasional untuk meningkatkan sumber daya manusia yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Lampung Tahun 2003 tentang Sumber Daya Manusia adalah pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Kependidikan dasar, Menengah dan kejuruan.

Salah satu program pembangunan pada sektor pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung adalah perluasan dan peningkatan mutu

pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, SMU diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Dalam hal ini SMU yang dimaksud adalah SMU Negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah dan memperoleh dana pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Fungsi pemerintah menurut Richard A. Musgrave (dalam buku Guritno Mangkoesoebroto, 2000:2) dibedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja Pemerintah, yaitu :

- 1 Fungsi Alokasi

Yaitu fungsi untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan publik.

2. Fungsi Distribusi

Yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis. Pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar, macam-ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas cabang distribusi tersebut.

3. Fungsi Stabilisasi

Yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan tingkat penggunaan faktor-faktor produksi yang tinggi dan kestabilan nilai uang.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penulisan, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pusaka, yang berisi Pengertian Pengeluaran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Teori Pendidikan, Mutu Pendidikan, Aspek Ekonomi Dalam Pendidikan. Pengeluaran dan Pembiayaan Sektor Pendidikan, Pembiayaan Pendidikan di Indonesia, Serta Hubungan Keuangan dan Mutu Pendidikan.

BAB III : Metode Penelitian, yang berisi Metode Pengumpulan Data, Gambaran Umum Provinsi Lampung, Keadaan Pendidikan di Provinsi Lampung, Pembangunan Pendidikan Menengah di Provinsi Lampung, Serta Penjabaran Visi dan Misi Pendidikan Nasional, Dan Model Analisis.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

BAB V : Simpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengeluaran Pemerintah

1. Dasar Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah sebagai salah satu bentuk lembaga dalam masyarakat, kegiatannya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang aman, adil dan makmur. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut maka pemerintah menggunakan barang dan jasa dengan berbagai bentuknya termasuk didalamnya yang berupa uang. Penggunaan uang untuk melakukan fungsi pemerintah inilah yang dimaksud dengan pengeluaran pemerintah.

Menurut Guritno Mangkoesobroto (2000 : 169) pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Teori mengenai pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Teori Makro, (Guritno Mangkoesobroto, 2000:169).
”Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase

investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya”.

2. Teori Mikro, (Guritno Mangkoesoebroto, 2000:177).
 1. Tujuan dari teori ekonomi mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik.
 2. Interaksi antara permintaan dan penawaran barang untuk publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut akan menimbulkan permintaan akan barang lain.

Anggaran belanja yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas pemerintah, salah satu aktivitas pemerintah adalah pengeluaran pembangunan dalam berbagai sektor diantaranya sektor pendidikan. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah direncanakan dalam perumusan anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan, karena anggaran tersebut merupakan variabel yang sangat penting dalam proses pembangunan masyarakat. Alokasi dana pemerintah dalam anggaran (*budget*) yang bertindak sebagai alat pengatur urutan prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai oleh karena itu usaha pembangunan harus selalu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Trilogi Pembangunan (M. Suparmoko, 1999:49).

Perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan beberapa faktor dibawah ini:

1. Perubahan permintaan akan barang publik.
2. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
3. Perubahan kualitas barang publik.
4. Perubahan harga-harga faktor-faktor produksi.

Melihat perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, peranan pemerintah cenderung meningkat. Peningkatan kegiatan pemerintah ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor, yaitu:

1. Adanya kenaikan tingkat penghasilan masyarakat, maka kebutuhan masyarakat meningkat. Hal ini mengakibatkan meningkatnya kegiatan pemerintah dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, seperti kebutuhan akan prsarana transportasi, pendidikan dan kesehatan umum.
2. Perkembangan penduduk, hal ini membutuhkan peningkatan kegiatan pemerintah untuk mengimbangi perkembangan penduduk dalam memenuhi kebutuhan penduduk tersebut.
3. Perkembangan ekonomi, juga dibutuhkan peranan pemerintah yang sama besar guna mengisi kegiatan ekonomi.

2. Fungsi dan Peranan Pemerintah

Fungsi pemerintah menurut Richard A. Musgrave (dalam buku Guritno Mangkoesoebroto, 2000:2) dibedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja Pemerintah, yaitu :

1. Fungsi Alokasi (*Allocation Branch*).

Yaitu fungsi untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan publik.

2. Fungsi Distribusi (*Distribution Branch*).

Yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis. Pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar, macam-ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas cabang distribusi tersebut.

3. Fungsi Stabilisasi (*Stabilization Branch*).

Yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan tingkat penggunaan faktor-faktor produksi yang tinggi dan kestabilan nilai uang.

Kaitan dengan permasalahan fungsi atau tujuan diatas hampir selalu dijumpai pada setiap permasalahan mengenai tujuan untuk politik pembangunan, tujuan untuk kebijakan perdagangan, kesempatan kerja, kesempatan memperoleh pendidikan, pertanian, perburuhan, dan lain-lain.

B. Pemerintah Daerah

Sistem administrasi Pemerintah Daerah di Indonesia ditandai oleh dua pendekatan yaitu dekonsentrasi dan desentralisasi. Dekonsentrasi adalah administrasi daerah dan fungsi pemerintah di daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Desentralisasi adalah fungsi pemerintahan tertentu dan kekuasaan mengambil keputusan tertentu yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang mencakup lembaga perwakilan yang dipilih. Koordinasi antara kedua sistem ini dilakukan melalui kepala daerah yang memiliki dua fungsi

(dwifungsi) yakni serentak selaku Kepala Pemerintah Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat di wilayah bersangkutan.

Kesadaran mengenai pentingnya peranan desentralisasi untuk melaksanakan pembangunan ekonomi merupakan alasan lain yang mendorong dirumuskannya program pembangunan daerah. Artinya desentralisasi memungkinkan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ditingkatkan karena :

1. Pemerintah daerah lebih mengetahui keadaan daerahnya. Oleh sebab itu mereka akan dapat melaksanakan/ merencanakan pembangunan daerahnya dengan lebih baik dari pemerintah pusat.
2. Apabila terdapat masalah-masalah dalam perencanaan maupun melaksanakan pembangunan maka masalah tersebut dapat diatasi dengan lebih cepat karena pemerintah daerah lebih mengetahui masalah itu dibandingkan dengan pemerintah pusat.
3. Jumlah masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah jauh lebih sedikit daripada yang dihadapi oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pemecahan masalah tersebut akan dapat dilakukan dengan cepat (Sadono Sukirno, 1982 : 118).

C. Pendidikan

1. Definisi Pendidikan

Arti pendidikan sebelumnya mari kita pahami dahulu istilah ilmu pendidikan (paedagogeik) dan pendidikan (paedagogie).Istilah diatas sebetulnya mempunyai makna yang berlainan “ilmu pendidikan” mempunyai makna yang sama dengan

istilah (paedagogeik), sedangkan “pendidikan” sama dengan istilah (paedagogie).

1. Ilmu Pendidikan

Ilmu pendidikan lebih menitik beratkan kepada pemikiran permenungan tentang pendidikan. Pemikiran bagaimana sebaiknya sistem pendidikan, tujuan pendidikan materi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, cara penilaian, cara penerimaan siswa, guru yang bagaimana, jadi di sini lebih menitik beratkan teori.

2. Pendidikan

Hal ini lebih menekankan dalam hal praktek, yaitu menyagkut kegiatan belajar mengajar. Tetapi keduanya ini tidak dapat dipisahkan secara jelas. Keduanya harus dilaksanakan secara berdampingan, saling memperkuat peningkatan mutu dan tujuan pendidikan.

Selanjutnya dalam diktat ini banyak menggunakan istilah pendidikan/ paedagogie dan mendidik, yang lebih menekankan prakteknya.

1. Arti pendidikan secara etimologi:

Paedagogie berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata ”PAIS”, artinya anak, dan ”AGAIN” diterjemahkan membimbing, jadi paedagogie yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak.

2. Secara definitif pendidikan (paedagogie) diartikan oleh para tokoh

pendidikan, sebagai berikut:

a) Ki Hajar Dewantara

Mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

b) SA. Bratanata dkk.

Pendidikan adalah usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun dengan cara yang tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaannya.

Secara garis besar pendidikan dapat diartikan dengan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pendidikan Nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. (Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Berdasarkan Pasal 3 UU RI Nomor 20/ tahun 2003, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan digolongkan menjadi tiga yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Pendidikan formal merupakan jalur

pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang terorganisir dalam wadah yang dinamakan sekolah. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dimana wadah pendidikan tersebut melalui lembaga pelatihan dan keterampilan ataupun kursus. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang terjadi di lingkungan keluarga yang berlangsung secara alamiah dan wajar.

Salah satu jalur pendidikan formal adalah pendidikan menengah yang merupakan lanjutan dari pendidikan dasar dengan lama pendidikan tiga tahun, terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, yang berbentuk Sekolah Menengah Umum (SMU), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan menengah umum merupakan pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa serta mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan menengah umum yang berbentuk SMU dibagi atas Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) dan Sekolah Menengah Umum Swasta. SMUN merupakan SMU yang diselenggarakan oleh pemerintah dan memperoleh dana pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan SMU Swasta diselenggarakan oleh yayasan-yayasan swasta dan memperoleh dana pendidikan dari yayasan tersebut.

D. Mutu Pendidikan

1. Definisi Mutu pendidikan

Dalam buku "Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah" Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pengertian mutu pendidikan mencakup input, proses dan output pendidikan. (1) Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses, yang berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan dan siswa), dan sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dsb). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana program dan sebagainya. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu tingginya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input, makin tinggi kesiapan input, makin tinggi pula input tersebut. (2) Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar dan monitoring dan evaluasi dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya. Proses dikatakan bermutu apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, dsb) dilaksanakan

secara harmonis sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. (3) Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses / perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktifitasnya, kualitas kehidupan kerjanya dan moral kerjanya. Jadi jika ketiga hal tersebut diatas telah dicapai, maka mutu pendidikan masa depan yang lebih baik akan terwujud.

Sedangkan menurut Ace Suryadi (1994:108) mutu pendidikan adalah kemampuan sistem pendidikan baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi, dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan itu sendiri, diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dari faktor-faktor input agar menghasilkan output setinggi-tingginya. Mutu bukanlah benda magis atau sesuatu yang rumit. Mutu didasarkan pada akal sehat. Sekarang ini, mutu menjadi satu-satunya hal yang sangat penting dalam pendidikan, bisnis dan pemerintahan.

Kita semua mengakui, saat ini memang ada masalah dalam sistem pendidikan. Lulusan SMU atau perguruan tinggi tidak siap memenuhi kebutuhan masyarakat. Masalah ini berakibat bagi masyarakat. Para siswa yang tidak siap jadi warga negara yang bertanggung jawab dan produktif itu, akhirnya hanya jadi beban masyarakat. Para siswa itu adalah produk sistem pendidikan yang tidak terfokus pada mutu, yang akhirnya hanya memberatkan anggaran kesejahteraan sosial saja. Adanya lulusan lembaga pendidikan yang seperti itu berdampak pula pada

sistem peradilan kriminal, lantaran mereka tak dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang, dan yang lebih parah lagi, akhirnya mereka menjadi warga negara yang merasa terasing dari masyarakatnya. Bila mutu pendidikan hendak diperbaiki, maka perlu ada pimpinan dari para profesional pendidikan.

Beberapa indikator yang dapat dijadikan tolak ukur mutu pendidikan antara lain :

1. Hasil akhir pendidikan.
2. Hasil langsung pendidikan.
3. Proses pendidikan.
4. Instrumental input.
5. Raw input dan lingkungan.

Salah satu indikator untuk mengukur mutu pendidikan yang sering digunakan adalah hasil akhir pendidikan yang diasosiasikan sebagai hasil belajar. Untuk pendidikan menengah sendiri, hasil belajar yang mudah diukur adalah hasil Ujian Akhir Nasional (UAN). Berdasarkan keputusan Menteri pendidikan Nasional No. 153/U/2003 tentang pedoman penyelenggaraan Ujian akhir Nasional (UAN), pasal 2 mengenai Tujuan dan Fungsi, dinyatakan bahwa :

1. Ujian Akhir Nasional (UAN) bertujuan untuk :
 - a. Mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
 - b. Mengukur mutu pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah/madrasah.
 - c. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan secara nasional, provinsi, kabupaten/kota, sekolah/madrasah kepada masyarakat.

2. Ujian Akhir Nasional (UAN) berfungsi sebagai :

- a. Alat pengendali mutu pendidikan secara nasional.
- b. Pendorong peningkatan mutu pendidikan.
- c. Bahan dalam menentukan kelulusan peserta didik.
- d. Bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

2. Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Dalam RPJM, pemerintah menyadari bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Sebagaimana kita ketahui bahwa nilai murid di Indonesia secara umum lebih rendah dari standar rata-rata.

Menurut pemerintah kualitas pendidikan ini terutama disebabkan oleh 1) ketersediaan pendidik yang belum memadai baik kualitas maupun kuantitas, 2) kesejahteraan pendidik masih rendah, 3) fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi, 4) biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai.

Persoalan rendahnya kesejahteraan pendidik juga merupakan persoalan tersendiri.

Alasan ini tak jarang menyebabkan pendidik terpaksa mencari tambahan pendapatan lain. Sehingga terjadi kasus sekolah atau pendidik menjadi agen penjualan buku-buku wajib untuk murid. Kejadian ini memungkinkan terjadinya buku wajib yang berganti setiap tahunnya, yang memberatkan beban orang tua murid. Ditengah upaya meningkatkan kualitas pendidikan ini, pemerintah menghadapi kendala yang serius yaitu keterbatasan dana.

3. Peningkatan Mutu Pendidikan dengan Ujian Nasional

Dalam logika pemerintah, ujian nasional adalah suatu cara yang mesti ditempuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan memang telah dicanangkan sebagai target bagi pemerintah dan tercantum dalam RPJM. Setelah PP no 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diterbitkan ujian nasionalpun diadakan sesuai rencana pemerintah. Pihak pemerintah mengklaim bahwa keputusannya ini diambil setelah didukung oleh serentetan studi yang dilakukan oleh Depdiknas.

Sebenarnya PP Standar Pendidikan Nasional ini menuai reaksi keras publik karena dituduh dibuat secara tergesa-gesa dengan maksud menjadi alat pengesah dari kebijakan pemerintah yang lain yaitu pelaksanaan ujian nasional. Pengadaan ujian nasional yang dilakukan secara tergesa-gesa ini dikritisi oleh masyarakat karena berbagai alasan di bawah ini :

1. Ketidaksiapan Murid. Ujian nasional dilaksanakan secara tiba-tiba membuat siswa tidak siap. Hal inipun cukup merepotkan guru, mereka kesulitan menjelaskan standar nilai kelulusan kepada siswa. Akibatnya mereka pun tidak tahu sejauh mana materi yang akan diberikan kepada siswa untuk persiapan ujian nasional. Pasalnya, standar nilai kelulusan akan ditentukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan yang pembentukannyapun baru saja dilakukan dan belum efektif bekerja. Kenyataan ini sangat meresahkan baik siswa, guru, maupun orang tua siswa.

2. Ujian Nasional diskriminatif terhadap sekolah pinggiran. Sekolah pinggiran seperti yang berada di daerah terpencil, daerah bencana, daerah konflik, dan daerah miskin tak memiliki kualitas yang sama dengan sekolah-sekolah di daerah lain. Oleh karena itu ujian nasional yang diadakan secara tergesa-gesa tak memberi kesempatan kepada mereka untuk menyiapkan diri secara lebih baik. Akibatnya ujian nasional cenderung diskriminatif terhadap mereka, jika dibanding dengan siswa dari daerah-daerah yang normal.
3. Ujian nasional cenderung memberatkan orang tua siswa. Biaya yang dikeluarkan oleh siswa menghadapi ujian nasional cenderung bertambah besar. Kenaikan biaya itu akibat biaya tak langsung untuk persiapan ujian nasional seperti biaya pengayaan materi mulai dari tambahan biaya pengajar dan tambahan materi dari buku-buku atau foto copy dan try out.
4. Memakai porsi anggaran pendidikan Depdiknas. Ujian nasional tidaklah murah, untuk menyelenggarakannya akan menelan anggaran Depdiknas yang dialokasikan dari APBN. Sebagai perbandingan, Ujian Akhir Nasional (UAN) 2004 misalnya menghabiskan anggaran sekitar Rp 300 milyar. Karena itu tak salah bila ada yang mengkritik bahwa penyelenggaran ujian nasional hanyalah pemborosan anggaran. Di tengah bertumpuknya persoalan pendidikan, pemborosan anggaran sangatlah tidak tepat.

Peningkatan mutu pendidikan dan standarisasi pendidikan tidaklah mudah.

Seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah justru pemikiran segar guna

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yang membutuhkan strategi bertahap dan tanpa penyeragaman. Sekolah-sekolah yang kurang berkualitas atau di daerah-daerah terpencil dapat dipacu dahulu dengan berbagai bantuan untuk peningkatan kualitas, baik dari segi prasarana dan tenaga pengajar, sampai akhirnya siap dilakukan standarisasi yang sesungguhnya.

E. Aspek Ekonomi Dalam Pendidikan

Masalah pendidikan sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari masalah ekonomi. Baik secara langsung maupun tidak langsung, kontribusi pendidikan terhadap ekonomi dan pembangunan harus diakui. Dengan demikian, tidak selamanya pendidikan dianggap sebagai konsumsi atau pembiayaan. Sudah saatnya, pendidikan harus dipandang sebagai investasi, yang secara jangka panjang kontribusinya dapat dirasakan.

Ukuran-ukuran Kontribusi Pendidikan Terhadap Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Bagaimanakan keterkaitan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi? Secara sederhana, jawaban atas pertanyaan tersebut dapat digambarkan berikut ini. Untuk menjawab hal tersebut di atas, kita tidak dapat melepaskan diri dari masalah pembangunan. Konsep pembangunan dalam bidang sosial ekonomi sangat beragam tergantung konteks penggunaannya. Ahli-ahli ekonomi mengembangkan teori pembangunan yang didasari kepada kapasitas produksi tenaga manusia di dalam proses pembangunan, yang kemudian dikenal dengan istilah Investment in Human Capital. Teori ini didasari pertimbangan bahwa cara

yang paling efisien dalam melakukan pembangunan nasional suatu negara terletak pada peningkatan kemampuan masyarakatnya.

Selain itu dihipotesiskan pula bahwa faktor utama yang mendukung pembangunan adalah pendidikan masyarakat. Teori human capital mengasumsikan bahwa pendidikan formal merupakan instrumen terpenting untuk menghasilkan masyarakat yang memiliki produktifitas yang tinggi. Menurut teori ini pertumbuhan dan pembangunan memiliki 2 syarat, yaitu 1. Adanya pemanfaatan teknologi tinggi secara efisien, dan 2. Adanya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Sumber daya manusia seperti itu dihasilkan melalui proses pendidikan. Hal inilah yang menyebabkan teori human capital percaya bahwa investasi dalam pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Asumsi dasar yang melandasi keharusan adanya hubungan pendidikan dengan penyiapan tenaga kerja adalah bahwa pendidikan diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk bekerja. Dengan kata lain, pendidikan menyiapkan tenaga-tenaga yang siap bekerja. Namun demikian pada kenyataannya tingkat pengangguran di hampir seluruh negara bertambah sekitar 2 % setiap tahunnya. Terjadinya pengangguran bukan disebabkan tidak berhasilnya proses pendidikan, namun pendidikan tidak selalu harus menghasilkan lulusan dengan jenis pekerjaan tertentu.

F. Pengeluaran dan Pembiayaan Sektor Pendidikan

1. Sumber-Sumber Pebiayaan Sektor Pendidikan

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dapat bersumber dari :

1. Pemerintah Daerah.

Dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 yang menyatakan bahwa pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

2. Dana Masyarakat.

Termasuk dana dari orangtua atau masyarakat atau dunia usaha maka diupayakan untuk membiayai kegiatan peningkatan mutu melalui program pengayaan dan program khusus yang disepakati orangtua.

3. Sumber lain.

Misalnya hibah, pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Komponen Pembiayaan Sektor Pendidikan

Komponen yang perlu dibiayai dalam pendidikan antara lain :

1. Kegiatan teknis edukatif untuk proses belajar-mengajar (kurikuler- dan

- kegiatan evaluasi hasil belajar).
2. Kegiatan penunjang untuk operasionalisasi ruang belajar dan kegiatan ekstrakurikuler.
 3. Perawatan sarana pendidikan (gedung, perabot, alat peraga dan media).
 4. Perawatan kegiatan penunjang (lingkungan sekolah).
 5. Kesejahteraan guru dan pegawai sekolah (gaji kelebihan jam mengajar, insentif, perjalanan).
 6. Langgan daya dan jasa (listrik, telepon, dan lain-lain).
 7. Program khusus yang mengacu pada peningkatan mutu sekolah yang bersangkutan.

G. Pembiayaan Pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.056/U/2001, pasal 6 Tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia dinyatakan bahwa “Penyelenggaraan pendidikan di sekolah terutama dibiayai dari anggaran daerah otonom. Selain itu, pembiayaan dapat dilakukan melalui pemberdayaan peran serta masyarakat, orangtua dan sumber lainnya”.

Pasal 7 menyatakan bahwa “Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berasal dari anggaran daerah otonom dialokasikan langsung ke sekolah yang bersangkutan. Alokasi tersebut setidaknya memuat rincian tentang belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, perjalanan, dan lain-lain. Pola alokasi pendanaan ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)”.

1. Sumber Dana

Sumber Dana Pendidikan di Indonesia antara lain :

a. Anggaran Pemerintah pusat

Sebagian dana pendidikan bersumber dari anggaran pemerintah pusat berupa anggaran rutin untuk membiayai sekolah-sekolah menengah negeri dan gaji guru, biaya perawatan Sekolah Dasar, biaya administrasi yang berhubungan dengan kegiatan ini. Anggaran pembangunan bagi kegiatan pengembangan fisik meliputi pengadaan tanah, pembangunan gedung, pengadaan ruang, proyek-proyek perintisan dan sarana penunjang lainnya.

b. Anggaran Pemerintah Tingkat Provinsi

Tiap provinsi mempunyai anggaran rutin dan pembangunan serta menerima dana dari pusat. Provinsi juga berwenang untuk mencari dana untuk semua tingkat pendidikan walaupun nilai dana relatif kecil.

c. Anggaran Pemerintah Tingkat Kabupaten.

Pemerintah kabupaten, kecamatan, maupun desa-desa memberikan bantuan kepada pendidikan dan dapat mengumpulkan dana sukarela baik berupa uang, tenaga maupun peralatan.

H. Keuangan dan Mutu Pendidikan

Anggaran pembangunan disediakan untuk proyek-proyek dan program pembangunan baru. Di Indonesia koordinasi antara anggaran rutin dan

pembangunan adalah masalah yang sangat kompleks dan merupakan tugas yang memerlukan ketekunan dari pejabat yang menaruh perhatian akan peningkatan mutu pendidikan.

Angka-angka pengeluaran untuk belanja pokok pendidikan sukar diperoleh, hampir semua dana investasi yang disediakan oleh pemerintah pusat terserap untuk mempertahankan fasilitas yang ada dan sangat sedikit sekali yang bisa disisihkan untuk membangun gedung baru. Ada provinsi dan kabupaten yang mampu menyisihkan sejumlah kecil dari anggaran pembangunan untuk membangun gedung baru.

Kesemua itu meletakkan beban berat ke orangtua dan masyarakat setempat, beban itu baik pemerintah provinsi maupun pemerintah setempat tidak mampu meringankan dengan memotong anggaran ruitnnya. Disamping itu, organisasi orangtua murid, guru dan masyarakat setempat harus mencari dana yang cukup baik dari ruang sekolah maupun sumber-sumber lain untuk membantu membayar gaji guru.

Keadaan tersebut diatas menunjukkan bahwa anggaran pembangunan dari Departemen Pendidikan Nasional merupakan sumber utama untuk memperbaiki mutu pendidikan. Di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia menghadapi empat masalah pokok pendidikan, pertama masalah pemerataan pendidikan, kedua masalah mutu pendidikan, ketiga masalah efisiensi pendidikan, dan keempat masalah relevansi pendidikan. Salah satu masalah pokok pendidikan yang bersifat kualitatif dan sedang terjadi saat ini adalah masalah

rendahnya mutu pendidikan yang merupakan masalah serius. Pada umumnya di negara-negara berkembang pendidikan di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah dan perguruan tinggi mutunya jauh lebih rendah daripada di negara-negara maju. Luasnya pelajaran dan mendalamnya pengetahuan yang diberikan pada tiap-tiap tingkat pendidikan di negara-negara berkembang lebih terbatas daripada di negara-negara maju.

Faktor-faktor yang menimbulkan keadaan tersebut menurut Sadono Sukirno (1985:199) adalah :

1. Mutu pendidikan yang rendah disebabkan oleh berkurangnya biaya yang dapat disediakan untuk memberikan pendidikan yang sempurna. Di satu pihak ada tekad yang sungguh-sungguh untuk mempertinggi taraf pendidikan, dilain pihak biaya yang disediakan terbatas.
2. Negara-negara berkembang menghadapi masalah kekurangan buku-buku teks yang sesuai dengan kepentingan dan keadaan mereka.
3. Kekurangan fasilitas dan gaji yang relatif rendah mengurangi gairah para pengajar untuk memberikan pelajaran kepada pelajar dan mahasiswa dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan menurut A. Atmaji dan Y. Setianingsih (2000:9), faktor-faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, yaitu :

1. Faktor dana pendidikan relatif kecil.
2. Faktor sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai.
3. Faktor kurikulum yang kurang menunjang peningkatan mutu karena masih

terlalu sentralistis, tidak realistis terhadap kondisi nyata siswa, dan sarat beban.

4. Faktor "kesemrawutan" sistem administrasi dan manajemen pendidikan termasuk didalamnya faktor terlalu banyaknya campur tangan birokrasi pemerintah.
5. Faktor rendahnya mutu guru.

Menurut Umar Tirtarahardja dan La Sula (1998:237), masalah-masalah tersebut di atas dapat diatasi apabila :

1. Pemerintah dapat mengalokasikan dana pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan minimal 20 persen dari APBD sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Pemerintah dapat menyediakan kesempatan pemerataan pendidikan, artinya semua warga negara yang membutuhkan pendidikan dapat ditampung dalam suatu satuan pendidikan yaitu sekolah.
3. Pendidikan dapat mencapai hasil yang bermutu, artinya perencanaan, pemrosesan pendidikan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.
4. Pendidikan terlaksana secara efisien, artinya pemrosesan pendidikan sesuai dengan rancangan dan tujuan yang ditulis dalam rancangan.
5. Produknya yang bermutu tersebut relevan, artinya hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yaitu data APBD Provinsi Lampung, anggaran pembangunan sektor pendidikan di Provinsi Lampung, anggaran pendidikan SMU Negeri di Provinsi Lampung dari tahun 2005-2008 dan rata-rata nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) Tahun Pelajaran 2004/2005 sampai dengan Tahun Pelajaran 2007/2008 SMU Negeri di Provinsi Lampung.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini bersumber dari :

1. Penelitian langsung berupa pengumpulan data yang berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Biro Keuangan Provinsi Lampung dan Biro Pusat Statistik Provinsi Lampung.
2. Penelitian pustaka berupa buku-buku yang berhubungan dengan penulisan ini seperti Kajian Nasional Pendidikan Indonesia, Informasi Singkat Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung serta buku-buku penunjang lainnya.

B. Gambaran Umum

1. Kondisi Umum Provinsi Lampung

Provinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 km² termasuk pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dalam jalur lintas darat maupun laut, posisi geografis Provinsi Lampung sangat strategis dan menjadi pintu gerbang yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Dengan posisi yang sangat strategis dan potensi tersebut Provinsi Lampung sangat berpeluang untuk mengembangkan berbagai sektor pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tersedianya sumber daya manusia yang unggul, bermutu, dan berdaya saing merupakan faktor kunci yang sangat penting dalam menggali, menggerakkan dan mengendalikan potensi dan keunggulan daerah tersebut bagi kemakmuran rakyat.

Jumlah penduduk di Provinsi Lampung pada tahun 2008 berjumlah 7.391.128 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk usia sekolah, yaitu usia 7-12 tahun sebanyak 945.492 jiwa, penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 443.124 jiwa, dan penduduk usia 13-18 sebanyak 401.491 jiwa. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pendidikan diperutukan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu aspek-aspek kependudukan, dinamika penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi

pendidikan. Dengan demikian, aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan.

Dalam administrasi Pemerintahan di Provinsi Lampung, selama 10 tahun terakhir telah terjadi beberapa kali pemekaran wilayah dengan sasaran dapat meningkatkan kemekmuran masyarakat. Dengan demikian saat ini Provinsi Lampung berkembang menjadi 11 Dati yang terdiri dari 2 (dua) kota dan 9 (sembilan) Kabupaten.

2. Keadaan Pendidikan di Provinsi Lampung

Selama pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan di Provinsi Lampung telah terjadi peningkatan pendidikan yang diwujudkan dengan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Kondisi tersebut di dukung oleh beberapa faktor seperti adanya struktur organisasi dan tata laksana dalam pembinaan pendidikan, tersedianya sarana dan prasarana yang relatif memadai serta dukungan masyarakat. Selain keberhasilan tersebut masih terdapat beberapa kendala dan kelemahan yang perlu di tingkatkan di masa mendatang.

Kondisi perkembangan pendidikan di Provinsi Lampung tahun 2008 dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah

a. Pendidikan Prasekolah

Pada tahun 2008/2009 jumlah TK di Provinsi Lampung sebanyak 1.709 unit, terdiri dari 19 unit TK Negeri dan 1.692 unit TK Swasta.

b. Pendidikan Dasar Tingkat SD/MI

Jumlah sekolah dasar (SD/MI) di Provinsi Lampung tahun 2008 tercatat 5.274 unit. Dari jumlah SD/MI tersebut 872 unit diantaranya SD/MI Swasta, total siswa SD/MI mencapai 1.050.965 siswa. Pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar didukung tenaga guru 49.537 orang dan ruang kelas 30.328 ruang. Pada tahun tersebut siswa mengulang sebanyak 41.419 orang, putus sekolah sebanyak 3.348 orang.

c. Pendidikan Luar Biasa

Pendidikan luar biasa tingkat SLB di Provinsi Lampung berjumlah 12 unit, ruang kelas sebanyak 27 unit dengan siswa 507 orang dan dengan tenaga guru sebanyak 64 orang.

d. Pendidikan Dasar Tingkat SMP/MTs

Jumlah SMP/MTs di Provinsi Lampung sebanyak 1.761 unit antara lain SMP Negeri 555 unit, MTs Negeri 24 unit, SMP Terbuka 85 lokasi dan SMP Swasta 617 unit, MTs Swasta 480 unit. Total siswa SMP/MTs yang tertampung selama tahun 2008 sebanyak 315.899 siswa. Sedangkan jumlah guru seluruhnya 20.501 orang dan ruang kelas sebanyak 10.236 ruang.

e. Program Pendidikan Menengah

Pada tahun 2008 jumlah SMA/MA/SMK di Provinsi Lampung sebanyak 679 unit antara lain SMA Negeri sebanyak 136 unit, MA 98 unit, dan SMA Swasta 223 unit. Jumlah siswa yang tertampung sebanyak 232.031 orang yang didukung tenaga guru sebanyak 20.425 orang. SMK

sebanyak 222 unit antara lain SMK Negeri sebanyak 47 unit dan Swasta 175 unit. SMK tersebut masing-masing terdiri dari 6 jenis sekolah kejuruan antara lain : kelompok pertanian dan kehutanan, kelompok teknologi dan industri, kelompok bisnis dan manajemen, kelompok pariwisata, kelompok kesejahteraan masyarakat, dan kelompok seni dan kerajinan.

2. Bidang Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi di Provinsi Lampung berkembang pesat seiring dengan penambahan penduduk dan pembangunan. Letak Lampung yang strategis juga memungkinkan kedatangan peserta didik dari berbagai daerah luar Lampung yang memasuki perguruan tinggi di Lampung. Meningkatnya demand pendidikan tinggi di Lampung ternyata di tanggapi dengan baik oleh masyarakat dengan mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Pada saat ini di Lampung telah berdiri dan beroperasi sebanyak 63 unit perguruan tinggi, yang terdiri dari 5 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 58 Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Perguruan Tinggi Negeri yaitu : Universitas Lampung (UNILA), Politeknik Negeri Lampung (POLINELA), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bandar Lampung, Politeknik Kesehatan Tanjung Karang dan STAIN Metro.

3. Pembangunan Pendidikan Menengah di Provinsi Lampung

Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah umum yang berbentuk SMU dibagi

atas SMU Negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah dan SMU Swasta yang diselenggarakan oleh yayasan-yayasan swasta.

Pembangunan pendidikan SMU Negeri di Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang cukup berarti. Tercatat pada tahun 2005 jumlah SMU Negeri sebanyak 112 sekolah meningkat menjadi 136 sekolah pada tahun 2008. pada tahun 2008 jumlah murid SMU Negeri sebanyak 59.568 orang atau dengan ratio murid per sekolah sebanyak 438, jumlah guru sebanyak 5005 orang dengan ratio seorang guru mengajar 11 murid. Dengan jumlah SMU Negeri yang terus bertambah setiap tahunnya menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memperhatikan keinginan masyarakat agar bisa mengenyam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Pembangunan pendidikan menengah pada jenjang SMU Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung merupakan usaha dalam pembangunan sumber daya manusia dan merupakan pembangunan yang sangat penting. Pembangunan pendidikan SMU Negeri di Provinsi Lampung dilaksanakan dengan :

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan agar semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam suatu satuan pendidikan yaitu SMU Negeri. Pada jenjang pendidikan menengah, kebijakan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan didasarkan atas pertimbangan kualitatif dan relevansi, yaitu minat dan kemampuan anak, keperluan tenaga kerja, dan keperluan pengembangan masyarakat, kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perhatian khusus terhadap

perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan diberikan bagi penduduk kurang mampu di daerah terpencil. Upaya perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan tersebut akan menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan.

2. Meningkatkan mutu pendidikan SMU Negeri melalui peningkatan hasil akhir belajar yaitu hasil ujian akhir nasional. Untuk mencapai hasil yang bermutu perlu dilakukan perencanaan dan pemrosesan pendidikan agar dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Upaya peningkatan mutu pendidikan berkaitan dengan pemerataan mutu pendidikan yang dimaksudkan agar segala jenis dan jenjangnya di seluruh pelosok tanah air baik di desa maupun di kota mengalami peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing.
3. Meningkatkan mutu dan kesejahteraan tenaga pendidik melalui peningkatan mutu para guru. Hanya dengan peningkatan mutu serta penghargaan yang layak terhadap profesi guru dapat dibangun suatu sistem pendidikan yang menunjang lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan, yaitu masyarakat demokrasi, berdisiplin, bersatu penuh toleransi dan pengertian serta bekerjasama.
4. Memberdayakan lembaga pendidikan SMU Negeri sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan.
5. Melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan SMU Negeri termasuk pembaruan kurikulum dan pelaksanaan desentralisasi pendidikan.
6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan SMU Negeri dalam menghadapi

perkembangan sumber daya manusia sedini mungkin.

4. Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional

1. Visi Pendidikan Nasional

Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berakhlak, berkeahlian, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berdasarkan hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

2. Misi Pendidikan Nasional

Untuk mewujudkan visi pendidikan nasional ditetapkan misi yang menjadi sasaran pembangunan pendidikan nasional, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan berkualitas guna mewujudkan bangsa yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin, bertanggung jawab, terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
4. Mewujudkan pengalaman ajaran agama dan ketakwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa dalam kehidupan, dan mantapnya persaudaraan antar umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai.

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

5. Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Pembangunan Sektor Pendidikan

Program pembangunan sektor pendidikan di Provinsi Lampung dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan yang dirumuskan dalam tiga pilar pendidikan nasional yaitu :

1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan
2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan
3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan.

Sedangkan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pembangunan sektor pendidikan secara operasional diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 Provinsi Lampung yaitu :

1. Mendorong perluasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang bermutu
2. Memantapkan/menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang

Bermutu

3. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah yang Bermutu
4. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan tinggi yang bermutu
5. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan nonformal yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja
6. pemerataan jumlah dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
7. mengembangkan budaya baca dan memperluas jaringan perpustakaan
8. menyelenggarakan pendidikan khusus yang bermutu, sekolah bertaraf internasional, luar biasa dan sekolah unggulan Lampung
9. Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat (masyarakat miskin, masyarakat desa tertinggal/terpencil dan penyandang cacat)
10. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan diseluruh jenjang dan jalur pendidikan dilandasi standar pelayanan minimal
11. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi program pendidikan.

C. Model Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis asosiatif, yaitu alat analisis yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Alat analisis ini mempunyai tingkatan yang tertinggi bila dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif. Dengan analisis ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Dalam analisis ini minimal terdapat dua variabel yang dihubungkan, dalam penelitian ini variabel yang dimaksud adalah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan mutu pendidikan SMU Negeri di Provinsi Lampung.

IV. PEMBAHASAN

Dalam bab I telah dijelaskan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan khususnya untuk anggaran pendidikan SMU Negeri di Provinsi Lampung sejak tahun 2005-2008 berfluktuasi dan perkembangannya cenderung mengalami peningkatan. Melihat keterangan tersebut maka diajukan hasil perhitungan bagaimana Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan SMU Negeri di Provinsi Lampung dan bagaimana konsistensi Kebijakan Pemerintah Daerah Lampung dalam meningkatkan mutu pendidikan SMU Negeri di Provinsi Lampung.

A. Analisis anggaran (Dana) Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Lampung

Berikut ini disajikan tabel hasil perhitungan anggaran sektor pendidikan tahun 2004-2008 di provinsi lampung.

Tabel 7. Analisis pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap APBD Provinsi Lampung tahun 2005-2008

Tahun	Anggaran Sektor Pendidikan (Rp)	APBD (Rp)	Persentase Pengeluaran Sektor Pendidikan Terhadap APBD (%)
2005	38.378.674.286	865.226.187.000	4.43
2006	45.359.208.065	1.294.948.833.000	3.50
2007	88.765.611.962	1.532.401.692.000	5.79
2008	62.267.990.350	1.711.015.164.000	3.63
Rata-rata	58.692.871.166	1.350.897.969.000	4.33

Sumber : BPS Lampung dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung (data diolah)

Pada tabel diatas terlihat bahwa perbandingan antara anggaran sektor pendidikan terhadap APBD Provinsi Lampung berfluktuasi dan nilainya cenderung mengalami peningkatan (mulai tahun 2005-2007) dan menurun pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 62.267.990.350. Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa porsi anggaran sektor pendidikan dalam APBD rata-rata hanya sebesar 4.33 persen. Tahun 2005 anggaran sektor pendidikan sebesar 4,43 persen dari APBD dan menurun sebesar 0,93 persen menjadi 3,50 persen pada tahun 2006. Namun pada tahun 2007 anggaran sektor pendidikan meningkat 2,29 persen menjadi 5,79 persen dari total APBD. Tahun 2008 anggaran sektor pendidikan kembali mengalami penurunan sebesar 2,16 persen menjadi 3,63 persen dari total APBD. Tabel diatas menunjukkan berapa besar porsi anggaran sektor pendidikan dalam total APBD.

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tersebut dialokasikan untuk jenjang pendidikan SD, SLTP dan SMU Negeri dan Swasta. Berikut ini disajikan tabel hasil perhitungan anggaran pendidikan SMU Negeri di Provinsi Lampung tahun 2005-2008.

Tabel 8. Analisis Anggaran Pendidikan SMU Negeri Terhadap Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Di Provinsi Lampung Tahun 2005-2008.

Tahun	Anggaran Pendidikan SMU Negeri (Rp)	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (Rp)	Anggaran Pendidikan SMU Negeri Terhadap Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (%)
2005	4.995.220.000	38.378.674.286	13,02
2006	5.250.937.000	45.359.208.065	11,58
2007	8.715.000.000	88.765.611.962	9,82
2008	8.777.225.000	62.267.990.350	14,10
Rata-rata	-	-	12,13

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Lampung (data diolah)

Pada tabel diatas terlihat bahwa perbandingan antara anggaran pendidikan SMU Negeri terhadap pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berfluktuasi dan nilainya cenderung mengalami penurunan dan hanya meningkat pada tahun 2008 dengan rata-rata sebesar 12,13 persen. Tahun 2005 anggaran pendidikan SMU Negeri sebesar 13,02 persen dari total anggaran sektor pendidikan, kemudian tahun 2006 menurun sebesar 1,44 persen menjadi 11,58 persen dari total anggaran sektor pendidikan. Tahun 2007 anggaran pendidikan SMU Negeri kembali mengalami penurunan sebesar 1,76 persen menjadi 9,82 persen dari total anggaran sektor pendidikan. Namun pada tahun 2008 anggaran pendidikan SMU Negeri mengalami peningkatan sebesar 4,28 persen menjadi 14,10 persen dari total anggaran sektor pendidikan.

Pada data tersebut dapat dilihat program pendidikan yang telah dilaksanakan dan jika dihubungkan dengan keadaan mutu pendidikan SMU Negeri, ternyata program pendidikan tersebut belum banyak mempengaruhi tingkat mutu pendidikan SMU Negeri yang ditunjukkan dengan menurunnya nilai rata-rata Ujian Nasional dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tersebut belum memenuhi sasaran, walaupun terdapat peningkatan pengeluaran tersebut belum mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan SMU Negeri yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung karena dalam membangun pendidikan tersebut terdapat hambatan rendahnya kemauan pemerintah dalam upaya pembangunan pendidikan.

Program-program dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan SMU Negeri

tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan yang ada pada Rencana Strategis (RENSTRA) provinsi Lampung dimana pemerintah mengeluarkan program prioritas untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Lampung dengan Programnya yaitu pembangunan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kependidikan menengah umum dan dan kejuruan dengan lima kegiatan aksi tetapi hanya satu kegiatan saja yang sesuai dengan program peningkatan mutu pendidikan yang telah terealisasi oleh pemerintah yaitu bantuan sarana sekolah SD,SLTP dan SMU. Ini berarti bahwa anggaran pendidikan SMU Negeri dan program peningkatan mutu pendidikan belum sepenuhnya konsisten ddengan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, sehingga akan mempengaruhi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) seperti yang diharapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan tentunya diperlukan kebijakan pengeluaran yang tetap dan efisien agar pembangunan pendidikan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu kualitas SDM dapat terlaksana dan tercapai.

Pembangunan pendidikan ini harus sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu :

1. Sumber daya manusia yang maju, mandiri dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang memadai dan masyarakat yang sejahtera, berketahanan dan berdaya saing dalam era globalisasi
2. Kualitas pendidikan melalui perluasan dan pemerataan pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat meningkat.

B. Analisis Mutu Pendidikan SMU Negeri di Provinsi Lampung

Berikut ini dijelaskan tentang indikator mutu pendidikan yaitu rata-rata nilai ujian akhir nasional SMU Negeri provinsi lampung untuk program IPA, IPS dan Bahasa. Pada bab 1 Tabel 6 dapat dilihat rata-rata nilai UAN SMU Negeri di Provinsi Lampung tahun 2005-2008 untuk program IPA, IPS, dan Bahasa. Rata-rata nilai UAN SMU Negeri secara keseluruhan dari tahun 2005-2008 untuk program studi IPA sebesar 7,25, untuk program studi IPS sebesar 6,64, dan untuk program studi Bahasa sebesar 7,13. jika dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 9. Rata-rata nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) SMU Negeri di Provinsi Lampung tahun 2005-2008.

Tahun	IPA	IPS	Bahasa
2005	6,45	5,77	6,64
2006	7,74	6,88	7,48
2007	7,44	6,97	7,44
2008	7,44	6,97	6,96
Rata-rata	7,25	6,64	7,13

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Lampung (data diolah)

Dalam tabel diatas terlihat bahwa nilai rata-rata Ujian Akhir Nasional (UAN)

untuk tiap program studi baik IPA, IPS, maupun Bahasa nilainya berflukatif.

Untuk program studi IPA nilai ujian akhir nasional hanya mengalami peningkatan

dari tahun 2005 sampai 2006 yaitu sebesar 1,29. Dan setelah itu nilai Ujian Akhir

Nasional (UAN) mengalami penurunan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun

2007 dan tahun 2008 dimana terjadi penurunan nilai sebesar 0,30.

Untuk program studi IPS nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) terus mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2005 nilai UAN untuk program studi IPS sebesar 5,77 dan mengalami peningkatan pada tahun 2006 sebesar 1,11 menjadi 6,88. Dan pada tahun 2007 terus mengalami peningkatan sebesar 0,09 dimana nilai UAN menjadi 6,97. Peningkatan ini tidak diikuti pada tahun 2008, dimana nilai UAN tetap sebesar 6,97.

Untuk program studi Bahasa nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) terus berfluktuatif. Pada tahun 2005 nilai UAN sebesar 6,64 dan mengalami peningkatan pada tahun 2006 sebesar 0,84 menjadi 7,48. Pada tahun 2007 nilai UAN mengalami penurunan sebesar 0,04 menjadi 7,44. Dan pada tahun 2008 nilai UAN untuk program studi Bahasa mengalami penurunan lagi sebesar 0,48 menjadi 6,96.

Rata-rata nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh nilai rata-rata UAN di tiap Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung. Nilai UAN di tiap Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung dapat dilihat dalam tabel 9 berikut :

Tabel 10. Nilai Rata-Rata Ujian Akhir Nasional (UAN) di Tiap Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung Tahun 2005-2008

Tahun	Kabupaten / Kota	Rata-rata Nilai UAN
2005	1. Bandar Lampung	7,12
	2. Metro	7,37
	3. Lampung Utara	6,38
	4. Lampung Barat	6,40
	5. Lampung Selatan	6,05
	6. Lampung Timur	5,82
	7. Lampung Tengah	5,68
	8. Tulang Bawang	6,10
	9. Tanggamus	6,01
	10. Way Kanan	5,87
	Rata-rata	6,28

2006	1. Bandar Lampung	7,86
	2. Metro	8,01
	3. Lampung Utara	7,01
	4. Lampung Barat	7,34
	5. Lampung Selatan	7,12
	6. Lampung Timur	7,34
	7. Lampung Tengah	7,47
	8. Tulang Bawang	7,31
	9. Tanggamus	7,30
	10.Way Kanan	6,94
	Rata-rata	7,37
2007	1. Bandar Lampung	7,90
	2. Metro	8,10
	3. Lampung Utara	6,90
	4. Lampung Barat	7,40
	5. Lampung Selatan	7,10
	6. Lampung Timur	7,30
	7. Lampung Tengah	7,40
	8. Tulang Bawang	7,35
	9. Tanggamus	7,20
	10.Way Kanan	6,98
	11. Pesawaran	6,45
	Rata-rata	7,28
2008	1. Bandar Lampung	8,01
	2. Metro	8,20
	3. Lampung Utara	6,45
	4. Lampung Barat	7,10
	5. Lampung Selatan	6,85
	6. Lampung Timur	7,02
	7. Lampung Tengah	7,22
	8. Tulang Bawang	7,10
	9. Tanggamus	6,96
	10.Way Kanan	6,85
	11. Pesawaran	6,56
	Rata-rata	7,12

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Lampung (data diolah)

Berdasarkan analisa-analisa diatas dapat dijelaskan bahwa dengan melihat program pembangunan pendidikan dan anggaran pendidikan SMU Negeri serta kondisi mutu pendidikan SMU Negeri Provinsi Lampung tahun 2005-2008

terlihat bahwa pembangunan pendidikan SMU Negeri belum mampu meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan rata-rata nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) SMU Negeri sehingga diperlukan pembangunan pendidikan yang lebih terarah.

Pembangunan pendidikan SMU Negeri seperti yang telah dijelaskan dalam gambaran umum telah sesuai dengan arah, tujuan dan sasaran dari pendidikan nasional yaitu meningkatkan kualitas mutu pendidikan melalui peningkatan mutu lulusan maupun peningkatan mutu lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan pendidikan yang tepat dan efisien yang dapat mengatasi masalah tersebut yaitu dengan mengalokasikan anggaran pendidikan yang jumlahnya terbatas tersebut untuk program-program/ kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan SMU Negeri di Provinsi Lampung.

Program-Program yang dimaksud adalah :

1. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan seperti laboratorium dan gedung olahraga. Laboratorium yang dimaksudkan seperti laboratorium Kimia, fisika dan Komputer.
2. Perbaikan ruang-ruang kelas yang dinilai kurang nyaman untuk digunakan.
3. Pengadaan buku-buku perpustakaan sebagai bahan penunjang pendidikan yang sesuai dengan kurikulum.
4. Meningkatkan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru, antara lain melalui pelatihan kompetensi tenaga pendidik, pemberian sertifikasi mengajar

bidang tertentu yang ditinjau dan evaluasi secara periodik, serta penyempurnaan sistem angka kredit untuk peningkatan karier guru.

5. Penyelenggaraan akreditasi sekolah.
6. Pelatihan kompetensi bagi para siswa yang berprestasi.
7. Pengadaan buku ujian nasional bagi SMU maupun SMK
8. Adanya peningkatan pengeluaran pemerintah dalam rangka pembangunan pendidikan, khususnya untuk SMU Negeri dari total pengeluaran pemerintah dalam APBD dan adanya kerjasama yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat agar lebih serius dalam memperhatikan pentingnya pendidikan sehingga masalah yang ada yaitu tingkat mutu pendidikan akan sesuai dengan tujuan pendidikan secara nasional.